

Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Ika Widiastuty¹, Mat Syuroh², Annada Nasyaya³

¹STISIPOL Candradimuka, Indonesia

²STISIPOL Candradimuka, Indonesia

³Universitas Sriwijaya, Indonesia

E-mail correspondence: ikawidiastuty62@gmail.com

ABSTRAK

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang terus berusaha melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan cara menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tanggal 4 September 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hal yang diidentifikasi yaitu: Komunikasi masih dilakukan satu arah yang berdampak pada: Gaya komunikator yang mengendalikan/ otoriter yang menggunakan jenis komunikasi lisan sifatnya satu arah (vertikal) sehingga atasan sulit untuk menerima keluhan, saran, dan tanggapan dari bawahan secara langsung serta Tanggapan dari bawahan/ komunikasi sulit diketahui oleh atasan karena dalam bentuk komunikasi tulisan yang berupa laporan bulanan, laporan tahunan, rencana kerja dan sasaran/ target kerja karena harus dibaca, diteliti dan dipelajari terlebih dahulu agar mudah dimengerti serta Masih ada pegawai yang belum mentaati peraturan mengenai Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa: secara keseluruhan Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 800/1492/BKD.1/2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, walaupun dari segi komunikasi, dan mekanisme/ prosedur masih mengalami sedikit hambatan. Seperti 1) Komunikasi masih dilakukan satu arah. 2) Masih ada pegawai yang belum mentaati peraturan mengenai Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19

ABSTRACT

South Sumatra Province is one of the provinces that continues to try to prevent the spread of Corona Virus Disease 19 in the Regional Government of South Sumatra Province, namely by following up on the Circular Letter of the Minister for Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform Number 67 of 2020 dated September 4, 2020 concerning Amendments to the Circular Letter of the Minister. Empowerment of the State Apparatus and Bureaucratic Reform Number 58 of 2020 concerning the Work System of State Civil Apparatus Employees in the New Normal Order. The purpose of this study is to determine the implementation of the policy for the prevention of the spread of the Corona Virus Disease 19 in the Regional Development Planning Agency of South Sumatra Province. The things identified are: Communication is still carried out in one direction which has an impact on: The controlling/authoritarian style of communicators who uses the type of verbal communication is one-way (vertical) so that superiors find it difficult to receive complaints, suggestions, and responses from subordinates directly and Responses from subordinates / communicant is difficult to be known by superiors because it is in the form of written communication in the form of monthly reports, annual reports, work plans and work targets / targets because they must be read, researched and studied first so that they are easy to understand and there are still employees who have not obeyed the regulations regarding the Spread Prevention Policy Corona Virus Disease 19 at the Regional Development Planning Agency of South Sumatra Province in 2020. The data analysis technique used in this study was qualitative data analysis techniques. This study shows that: overall the implementation of the policy for preventing the spread of the corona virus disease 19 at the Regional Development Planning Agency of South Sumatra Province, it can be concluded that the overall implementation of the policy for preventing the spread of the corona virus disease 19 in the regional development planning agency for the province of South Sumatra has been carried out in accordance with the letter Circular of the Governor of South Sumatra Number 800/1492/BKD.1/2020 concerning the Work System of the State Civil Apparatus in the New Normal Order in the South Sumatra Provincial Government, although in terms of communication, and mechanisms/procedures are still experiencing some obstacles. Such as 1) Communication is still done in one direction. 2) There are still employees who have not complied with the regulations regarding the Policy for the Prevention of the Spread of Corona Virus Disease 19 at the Regional Development Planning Agency of South Sumatra Province in 2020

Keywords: *Implementation, Policies to Prevent the Spread of Corona Virus Disease 19*

PENDAHULUAN

Penyakit virus Corona yang bernama COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan menyebar ke sebagian besar negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus ini.

Setiap pengelola area terus berupaya mencegah penyebaran penyakit Corona 19

untuk memerangi penyakit Corona 19 dengan gejala mirip flu. Salah satu provinsi yang berhasil mencegah penyebaran penyakit virus Corona 19 di Pemprov Sumsel adalah Provinsi Sumsel.

Berdasarkan data Gugus Tugas Covid19 Sumsel, penambahan jumlah positif mencapai lebih dari 200 kasus. Sebelumnya, jumlah kasus positif bertambah 100 hingga 150 kasus per hari. Per 30 Juni 2021 jumlah kasus tambahan Covid-19 sebanyak 223 kasus, sedangkan per 1 Juli 2021 jumlah kasus Covid-19 bertambah 229 kasus. Dengan tambahan

tersebut, total kasus infeksi Covid-19 menjadi 28.992. Seiring dengan bertambahnya kasus positif Covid19, angka kesembuhan di Sumsel kini tercatat 25.727 orang, dan angka kematiannya masih tinggi yakni mencapai 1.463 orang. Adapun jumlah kasus positif Covid19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumsel periode September 2020 hingga Agustus 2021 sebanyak 25 kasus dengan tingkat kesembuhan 25 kasus.

Menelaah data Gugus Tugas Covid19 di Provinsi Sumsel, Provinsi Sumsel merupakan salah satu provinsi yang terus berupaya mencegah penyebaran penyakit Corona 19 oleh Pemerintah Provinsi Sumsel khususnya adalah dengan mengikuti Surat Edaran Menteri Reformasi Administrasi dan Birokrasi Nomor 67 tanggal 4 September 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri tentang Kewenangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Rezim Ketenagakerjaan Kader dan Pegawai Negeri Sipil. Perangkat status pesanan normal baru.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu instansi/dinas di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah menerapkan kebijakan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. badan yang mendukung kerja pemerintahan yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Tetapi dalam kebijakan mencegah penyebaran virus di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, masih ada kendala tentang pelaksanaan kebijakan, termasuk: Transmisi komunikasi masih dilakukan arahan, harus berdampak pada: Puncak sulit dilakukan Dapatkan keluhan, saran,

dan umpan belakang primer dari komentar langsung dan bawahan sangat sulit diketahui oleh pimpinan karena muncul sebagai pertukaran tertulis. Komunikasi antara atasan dan bawahan menggunakan komunikasi oral dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan di sini berarti komunikasi yang terjadi dalam rapat, isi pesan (peraturan daerah) kemudian dikirim langsung ke kantor kantor masing-masing lembaga penegakan lainnya. Komunikasi verbal ini hanya terjadi satu arah, bersama. Sementara itu, memperoleh umpan balik dari komunikasi, komunikasi (karyawan) melalui komunikasi tertulis, seringkali dalam bentuk laporan bulanan atau tahunan dan tujuan / target publik.

Masalah kedua: masih ada pegawai yang belum memenuhi ketentuan kebijakan pencegahan penyebaran virus corona 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020. Seperti masih ada pegawai yang tidak memakai masker, tidak mencuci tangan saat masuk kantor, tidak menjaga jarak saat bekerja. Di bawah ini adalah data karyawan yang tidak patuh dan yang mematuhi peraturan.

Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang belum mentaati Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19. Jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 116 orang. Pegawai yang sudah mentaati peraturan sebanyak 73 orang atau sekitar 63, 93 % sedangkan pegawai yang belum mentaati peraturan sebanyak 43 orang atau sekitar 37, 06 %.

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa masalah Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjadi menarik untuk diteliti, yaitu:

a. Komunikasi masih dilakukan satu arah yang berdampak pada: Gaya

komunikator yang mengendalikan/ otoriter yang menggunakan jenis komunikasi lisan sifatnya satu arah (vertikal) sehingga atasan sulit untuk menerima keluhan, saran, dan tanggapan dari bawahan secara langsung serta Tanggapan dari bawahan/ komunikasi sulit diketahui oleh atasan karena dalam bentuk komunikasi tulisan yang berupa laporan bulanan, laporan tahunan, rencana kerja dan sasaran/ target kerja karena harus dibaca, diteliti dan dipelajari terlebih dahulu agar mudah dimengerti.

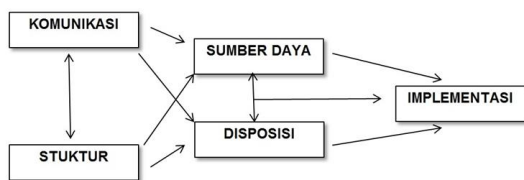
- b. Masih ada pegawai yang belum mentaati peraturan mengenai Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desease 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020.

TINJAUAN PUSTAKA

Kualitas Pelayanan

Menurut George C. Edward III (dalam Islamy: 1996: 65), implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijakan yang berada diantara tahapan penyusunan kebijakan dan hasil atyau konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan itu.

Adapun model pemikiran menurut George C. Edward III (dalam Islamy: 1996: 65), dapat dilihat pada gambar 6 sebagai berikut:



Gambar 6: Model Implementasi kebijakan menurut George C. Edward III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berkaitan dengan

implementasi kebijakan pencegahan penyebaran penyakit virus corona 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, oleh karena itu jenis penelitian yang digunakan dalam proses standardisasi. metode penelitian dengan teknik analisis data kualitatif.

Implementasi kebijakan pencegahan penyebaran virus corona 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan diukur dengan Model Implementasi Kebijakan dari *George C. Edwards* (Tangkilisan, 2003:11-12) dengan indikator sebagai berikut :

Tabel 2
Definisi Operasional

Variabel	Dimensi	Indikator
Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desease 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Komunikasi	a. Komunikasi vertikal b. Komunikasi horizontal c. Komunikasi diagonal
	Sumber Daya	a. Sumber Daya Manusia (SDM) b. Sarana dan prasarana c. dana/ anggaran
	Disposisi/sikap	Kepribadian pelaksana
	Struktur Birokrasi	a. Wewenang dan Tanggung Jawab b. Prosedur atau mekanisme kerja c. Koordinasi antar bagian

Sumber: *George C. Edwards* (Tangkilisan, 2003:11-12)

Informan dalam penelitian ini diidentifikasi berdasarkan kompetensi/kemungkinan, yaitu para pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Staf/ pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 3 (tiga) orang.
5. Masyarakat sebanyak 2 orang.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Observasi lapangan secara langsung dan catatan atas isu-isu kunci yang relevan dengan penelitian ini, berkaitan erat dengan pengamatan terhadap hambatan/kelemahan, tantangan, ancaman, dan peluang dalam melaksanakan kebijakan pencegahan penyebaran penyakit virus corona 19 Observasi bertujuan untuk memperoleh gambaran empiris berupa data yang relevan tergantung pada kondisi dan situasi di lapangan. Dalam penelitian ini, apa yang akan diobservasi terkait hasil observasi terhadap implementasi Kebijakan Pencegahan Penyakit Virus Corona 19.

2. Wawancara

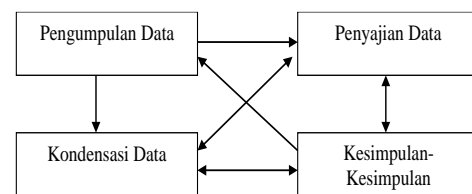
Wawancara dilakukan kepada pihak terkait dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19, yaitu Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Staf/pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 3 (tiga) orang serta masyarakat sebanyak 2 orang. Wawancara tidak dilaksanakan dengan struktur yang ketat, tapi dengan pertanyaan yang semakin memfokus pada permasalahan sehingga informasi yang terkumpul cukup mendalam. Dalam penelitian ini yang akan ditanyakan yaitu hal-hal yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19.

3. Dokumentasi

Data implementasi kebijakan pencegahan penyebaran penyakit Corona 19, kedua dokumen data ini akan dibandingkan untuk mengetahui peningkatan implementasi kebijakan pencegahan penyakit Corona 19 antara tahun depan dan tahun lalu. Teknik

pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen dari berbagai pendaftar, arsip, buku dan peraturan terkait pelaksanaan kebijakan pencegahan penyebaran penyakit virus Corona 19 .

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014: 14) yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). langkah-langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Salda (2014: 14) akan diterapkan sebagaimana berikut:



Bagan 3.1 : Komponen.komponen Analisis Data Model Interaktif
Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun analisis indikator dalam penelitian ini yang menyangkut Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan teori menurut implementasi kebijakan dari *George C. Edwards* (Tangkilisan, 2003:11-12), yaitu sebagai berikut: 1) Komunikasi terdiri dari Komunikasi Vertikal, Komunikasi Horizontal dan Komunikasi Diagonal, 2) Sumber daya terdiri dari: Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan prasarana dan dana/ anggaran, 3) Disposisi/ sikap terdiri dari Kepribadian pelaksana, 4) Struktur Birokrasi terdiri dari Wewenang dan Tanggung Jawab, Prosedur atau mekanisme kerja, dan Koordinasi antar

bagian. Pembahasan yang lebih rinci mengenai setiap indikator akan diuraikan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari segi komunikasi terdiri dari komunikasi vertikal, komunikasi horizontal dan komunikasi diagonal. Pembahasan yang lebih rinci dari indikator-indikator tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

a. Komunikasi Vertikal

Komunikasi vertikal yang dilakukan dalam kebijakan pencegahan penyebaran penyakit virus corona 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah melalui implementasi regulasi. Artinya komunikasi vertikal yang telah selesai telah menyelesaikan semua item/item komunikasi. Dapat dilihat bahwa komunikasi vertikal didasarkan pada proses komunikasi vertikal, yaitu dari kepala instansi kepada bawahannya dan memiliki semua unsur komunikasi. Namun masih terdapat kendala dalam komunikasi vertikal yaitu komunikasi selalu dilakukan ke arah dampak: Atasan sulit menerima keluhan, saran dan masukan dari bawahan, tepat waktu Atasan langsung dan pendapat bawahan/komunikator sulit diketahui karena dikomunikasikan dalam bentuk laporan bulanan, laporan tahunan, laporan rencana kerja dan sasaran/sasaran kerja karena harus terlebih dahulu dibaca, dipelajari dan dipahami dengan cara yang mudah dipahami.

b. Komunikasi Horizontal

Komunikasi horizontal dalam

kebijakan pencegahan penyebaran penyakit virus corona 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan antar departemen yang digunakan sebagai alat koordinasi kerja antar departemen tersebut agar tidak terjadi kesamaan pekerjaan. Lapangan memiliki tugasnya sendiri. Komunikasi horizontal dilakukan antar departemen, seperti komunikasi antara 1) Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan dengan Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan, 2) Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan dengan Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, 3) Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis maupun yang dilakukan antar kepala Sub Bidang.

c. Komunikasi Diagonal

Komunikasi diagonal dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan memutus alur komunikasi yang ditentukan oleh organisasi, yang biasanya harus melewati prosedur dan tahapan tertentu.

2. Sumber Daya

Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari segi sumber daya terdiri dari yang terdiri dari Sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana/ anggaran. Pembahasan yang lebih rinci dari indikator-indikator tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Secara kualitas dan kuantitas, sumber daya manusia di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 sudah cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari, secara kualitas, sumber daya manusia yang terlibat dalam Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 seluruhnya berpendidikan Sarjana Strata 1 (S-1) dan sudah diberikan pembinaan berupa pendidikan dan pelatihan. Sedangkan secara kuantitas, jumlah pelaksana yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 5 orang yang terdiri dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Pelaksana.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 di di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup memadai dan dalam kondisi baik. Adapun sarana dan prasarana yang ada antara lain Masker Sinar Ogan 3 ply @50 pcs sebanyak 130 kotak, Sarung Tangan Latex Karet sebanyak 4 kotak, Handspray Pure + uk. 500ml sebanyak 15 botol, Face shield (pelindung wajah) sebanyak 130 pcs, Disinfektan (Antigerman Forte) uk.5 liter sebanyak 79 buah, Sprayer Disinfektan Nagata 2 in 1 uk. 16 liter sebanyak 1 buah, Sprayer Disinfektan Booster Elektrik uk. 16 liter sebanyak 1 buah, Sprayer Disinfektan Miko Elektrik uk. 16 liter sebanyak 1 buah, Thermometer Merk Vikacheck sebanyak 2 buah, Hand Soap SKP uk.1 liter sebanyak 65 buah, Hand sanitizer Gel uk 5 liter sebanyak 50 buah, Masker kain bahan American Drill Katun sebanyak 520

buah, Set Meja wastafel portabel sebanyak 5 buah, Pipa ½ inch sebanyak 15 buah, Pipa 2 ½ inch sebanyak 8 buah, L Ukuran ½ inch sebanyak 20 buah , L Ukuran 2 ½ inch sebanyak 12 buah, T Ukuran ½ inch sebanyak 3 buah, T Ukuran 2 ½ inch sebanyak 5 buah ,Shock drat ½ inch sebanyak 7 buah, Shock ½ inch sebanyak 2 buah, Shock 2 ½ inch sebanyak 5 buah, Stop Kran ½ inch sebanyak 3 buah, Lem sebanyak 3 kaleng, Isolatif Pipa sebanyak 4 buah , Silikon sebanyak 1 botol, Gergaji Besi sebanyak 2 buah, Kabel Tiles sebanyak 1 bungkus, Jasa instalasi sebanyak 1 kegiatan.

c. Dana/ Anggaran

Dana/ anggaran dalam Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah memadai. Hal ini dapat dilihat dari dana/ anggaran dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah disediakan dana sebesar Rp. 210.000.000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan, yang digunakan untuk Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih.

3. Disposisi (sikap)

Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari segi disposisi (sikap) terdiri dari yang terdiri dari Kepribadian pelaksana. Pembahasan yang lebih rinci dari indikator tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

a. Kepribadian Pelaksana

Kepribadian pelaksana Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari wewenang dan tanggung jawab, prosedur/ mekanisme kerja dan koordinasi antar bagian

a. Wewenang dan Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah dilaksanakan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Hal ini bisa dilihat dari dalam Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 tidak terlepas dari peran serta tanggung jawab dari seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara maupun tenaga honorer yang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bappeda Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seperti Kepala Badan, Sekretaris Badan, Subbagian Umum dan Kepegawaian serta Pelaksana (ASN dan honorer).

b. Prosedur/ Mekanisme Kerja

Dalam melaksanakan Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku sebagai panduan kerja di lingkungan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk aktifitas yang berkaitan Pencegahan covid-19. Adapun mekanisme/ prosedur Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah : 1) Deteksi di pintu masuk kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2) Deteksi personal di dalam kantor Bappeda, 3) Bersih Diri Pasca Evakuasi, 4) Sterilisasi. Akan tetapi dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 masih ada pegawai yang belum mentaati peraturan mengenai Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020. Seperti masih ada pegawai yang tidak memakai masker, tidak mencuci tangan saat memasuki kantor serta tidak menjaga jarak saat bekerja.

c. Koordinasi Antar Bagian

Koordinasi antar bagian dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Adapun koordinasi antar bagian dilakukan dengan 1) Gubernur, 2) Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan melaporkan penanggulangan covid-19 di Organisasi Perangkat Daerah (yang terpapar, melakukan cuci tangan dan lain-lain) setiap periode tertentu. Laporan ditujukan ke Sekretariat Daerah melalui Asisten 3 dan 3) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di suruh membuat tim Satuan Tugas penanganan covid-19 di Organisasi Perangkat Daerah masing-masing. Tim Satuan Tugas Organisasi Perangkat Daerah mendata jika

ada yang terpapar, dibuat surat resmi ke Dinas Kesehatan melalui RSUD Siti Fatimah.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada mengenai Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 800/1492/BKD.1/2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, walaupun dari segi komunikasi, dan mekanisme/ prosedur masih mengalami sedikit hambatan. Seperti 1) Komunikasi masih dilakukan satu arah yang berdampak pada: Gaya komunikator yang mengendalikan/ otoriter yang menggunakan jenis komunikasi lisan sifatnya satu arah (vertikal) sehingga atasan sulit untuk menerima keluhan, saran, dan tanggapan dari bawahan secara langsung serta Tanggapan dari bawahan/ komunikator sulit diketahui oleh atasan karena dalam bentuk komunikasi tulisan yang berupa laporan bulanan, laporan tahunan, rencana kerja dan sasaran/ target kerja karena harus dibaca, diteliti dan dipelajari terlebih dahulu agar mudah dimengerti. 2) Masih ada pegawai yang belum mentaati peraturan mengenai Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan pencegahan penyebaran penyakit virus corona 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan implementasi kebijakan untuk pencegahan penyebaran penyakit virus Corona. aparatur sipil negara orde baru pemerintah provinsi Sumatera Selatan, meskipun dari segi interoperabilitas dan mekanisme/prosedur masih menghadapi kendala. Seperti 1) Komunikasi selalu dilakukan satu arah, hal ini berdampak: Gaya kendali/kewenangan komunikator menggunakan jenis komunikasi verbal ini adalah satu arah (vertikal) sehingga atasan sulit menerima keluhan, saran dan jawaban. dari bawahan langsung dan balasan dari bawahan/komunikator sulit diketahui oleh atasan karena dikomunikasikan dalam bentuk pemberitahuan tertulis berupa laporan bulanan, laporan tahunan, rencana kerja dan sasaran.Sasaran/sasaran pekerjaan perlu dibaca, dipelajari dan dipelajari. buat mereka mudah dipahami terlebih dahulu. 2) Masih terdapat pegawai yang tidak mematuhi peraturan mengenai kebijakan pencegahan penyebaran penyakit virus corona 19 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi. (1999). *Psikologi Sosial*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Anderson, J.E. 1978. *Public Policy Making*. Holt Rinehart And Windton: Newyork
- Budiarjo, Meriam. 1992. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Putaka

- Cangara, Hafied. 2000. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fahmi, Ali. 2003. *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir dalam Upaya Meningkatkan PAD*. Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang: Ilmu Administrasi Negara
- Gother. 1996. *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*, JLP UNDIP, Semarang
- Lewis A. Gunn and Brian W. Hogwood. 1983. *Policy analysis for the real world*. Oxford : Oxford University Press
- Hoogerwerf. 1983. *Isi dan Corak-corak Kebijaksanaan*. Jakarta: Erlangga
- Islami, M. Irfan. 1994 dan 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Isworo, Waluyo Iman. 1996. *Beberapa Pendekatan dan Analisis dan Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kumorotomo, Wahyudi. 1999. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Lineberri, Robert. 1978. *American Public Policy*. North Western University Harpen And Row. Newyork
- Mazmanian, Daniel dan Sabartier, Paul.1993. *Implementation And Public Policy*. USA: Forsman And Company
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Nasution, Zulkarnaen. (2006). *Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan*. Malang: UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang Noraga, Panji. 1995. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Putaka Jaya
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Impelemntasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Santoso, Priyo Budi. 1988. *Birokrasi Pemerintahan Orde Baru Perspektif Kultural dan Struktural*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Strauss and J. Corbin. 1990. *Qualitative Research; Grounded Theory Procedure and. Techniques*. London: Sage Publication.
- Sugiyono. 1999. *Metode Penelitian Asministrasi*. Bandung: CV Alfabeta
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Thoha, Miftah. 1992. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wahab, Abdul. 1991 dan 1997. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Peraturan lainnya:
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tanggal 4 September 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru
- Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 800/1492/BKD.1/2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.